

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbatasan lapangan pekerjaan dan faktor ekonomi menumbuhkan motivasi masyarakat untuk mencari peluang pekerjaan di luar negeri. Masyarakat Indonesia merasa dengan bekerja di luar negeri dapat menstabilkan ekonomi serta sosial mereka. Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Kontribusi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri jika dilihat dari sosial dan tujuan pembangunan ekonomi dapat membantu mengatasi permasalahan negara yakni, meningkatkan devisa negara, memperluas lapangan pekerjaan serta mensejahterakan masyarakat. Menurut (Bachtiar, 2004) bekerja di luar negeri merupakan usaha untuk mengatasi problem tenaga kerja yang ada pada suatu daerah/negara

Migrasi tenaga kerja internasional adalah pergerakan orang dari satu negara ke negara lain dengan tujuan agar mendapatkan pekerjaan. Sejarah mencatat bahwa migrasi antar negara sudah ada sejak lama terjadi selama ratusan tahun dengan diawali dengan memenuhi kepentingan pemerintah Kolonial bangsa Eropa pada masa itu dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja. Dalam perkembangannya, fenomena migrasi tenaga kerja internasional saat ini sudah menjelma sebagai sebuah industri migrasi yang sudah dikelola secara komersial dan profesional. Kontribusi pekerja migran dari sisi ekonomi dapat dirasakan melalui besarnya remitan yang dikirimkan. Aliran uang masuk dari remitan baik yang dikirim oleh pekerja migran maupun yang dibawa saat mereka pulang, akan berpengaruh pada besarnya Neraca Pembayaran Indonesia. Berdasarkan hasil survei tentang remitan yang dilakukan oleh Bank Indonesia 2008, dikatakan bahwa nilai remitan telah mencapai satu pertiga inflow dari penanaman modal asing (foreign direct investment) dan melampaui utang luar negeri pemerintah (Official Aid) (BI, 2009).

Hasil survei terhadap mantan pekerja migran menunjukkan bahwa masih belum tersedia data yang pasti mengenai jumlah mereka. Namun, dari data yang ada, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mantan pekerja migran menggunakan penghasilan yang mereka peroleh dari

pekerjaan di luar negeri untuk membangun rumah, membeli tanah, dan memulai usaha ternak. Meskipun demikian, mereka masih menghadapi sejumlah masalah, di antaranya adalah kembali ke dalam lingkaran kemiskinan dan mengalami pengangguran setelah kembali ke Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, jumlah penempatan pekerja migran Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditangani oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI): Data menunjukkan bahwa setiap tahunnya, ribuan pekerja migran Indonesia dipulangkan oleh pemerintah setelah mengalami berbagai masalah di tempat kerja mereka di luar negeri. BP2MI aktif dalam menangani kasus-kasus tersebut dan memberikan perlindungan serta bantuan kepada para pekerja migran yang membutuhkannya.

Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten: Meskipun ada upaya dari pemerintah pusat melalui BP2MI, namun data menunjukkan bahwa masih ada banyak mantan pekerja migran yang belum tersentuh oleh program-program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam upaya pemberdayaan para mantan pekerja migran di tingkat lokal.

Tantangan yang dihadapi oleh mantan pekerja migran: meskipun sebagian besar mantan pekerja migran memiliki keinginan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan menggunakan penghasilan dari pekerjaan di luar negeri, namun kenyataannya banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang layak dan produktif setelah kembali ke Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak dari mereka kembali terjermus ke dalam kemiskinan dan mengalami pengangguran.

Dari data yang tersedia, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun jumlah pekerja migran Indonesia yang dipulangkan setiap tahunnya cukup signifikan, masih ada sejumlah besar di antara mereka yang belum menerima perhatian yang memadai dari pemerintah setelah kembali ke tanah air. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk upaya lebih lanjut dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan bagi para mantan pekerja migran Indonesia.

Pentingnya upaya pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan bagi para mantan pekerja migran Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Para mantan pekerja

migran sering kali menghadapi tantangan yang besar dalam memulai kembali kehidupan mereka di tanah air setelah pulang dari bekerja di luar negeri. Mereka sering menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak dan produktif, serta mengalami risiko kemiskinan dan pengangguran.

Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada para mantan pekerja migran sangatlah penting. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan yang menyeluruh, yang mencakup pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, pendampingan dalam memulai dan mengelola usaha, serta berbagai bentuk bantuan sosial dan perlindungan lainnya.

Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga dan instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan koordinasi yang baik, akan lebih mudah untuk menyediakan layanan yang terpadu dan efektif bagi para mantan pekerja migran, serta mengidentifikasi dan menangani berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh mereka.

Di samping itu, perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung dan memberikan dukungan kepada para mantan pekerja migran. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang kontribusi yang diberikan oleh para mantan pekerja migran bagi pembangunan ekonomi dan sosial negara, serta pentingnya memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi mereka untuk memulai kembali kehidupan mereka di tanah air.

Dengan demikian, upaya pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan bagi para mantan pekerja migran Indonesia menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa diabaikan. Dengan adanya dukungan yang memadai dari pemerintah dan masyarakat, para mantan pekerja migran akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memulai kembali kehidupan mereka di tanah air dengan layak, produktif, dan bermartabat.

Pentingnya upaya pemerintah dalam konteks ini terletak pada peningkatan kualitas hidup para mantan pekerja migran, yang seringkali menghadapi tantangan besar setelah kembali ke Indonesia. Tanpa adanya dukungan yang memadai, banyak di antara mereka yang terjerumus ke dalam kemiskinan dan pengangguran, tanpa memiliki akses yang memadai terhadap peluang dan sumber daya yang dapat membantu mereka memulai kembali kehidupan di tanah air.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada para mantan pekerja migran. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan yang menyeluruh, yang mencakup berbagai aspek kehidupan mereka seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, pendampingan dalam memulai dan mengelola usaha, serta berbagai bentuk bantuan sosial dan perlindungan lainnya.

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam memberikan dukungan kepada para mantan pekerja migran. Dengan meningkatkan kesadaran dan empati masyarakat terhadap kondisi para mantan pekerja migran, diharapkan akan lebih banyak bantuan dan kesempatan yang diberikan kepada mereka untuk memulai kembali kehidupan di tanah air dengan layak dan bermartabat.

Koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan instansi terkait juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa program-program pemberdayaan dan perlindungan bagi para mantan pekerja migran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan koordinasi yang baik, akan lebih mudah untuk menyediakan layanan yang terpadu dan menyeluruh bagi para mantan pekerja migran, serta mengidentifikasi dan menangani berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh mereka. Dengan demikian, upaya pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan bagi para mantan pekerja migran Indonesia tidak hanya penting, tetapi juga mendesak. Dengan adanya dukungan yang memadai, para mantan pekerja migran akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memulai kembali kehidupan mereka di tanah air dengan layak, produktif, dan bermartabat, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan negara secara keseluruhan.

Tabel 1.1 Jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri

No	Tahun	Jumlah PMI
1	2020	4.355 Orang
2	2021	6.364 Orang
3	2022	11.023 Orang

Sumber : Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Mei 2022

Berdasarkan data tersebut dari tahun 2020 hingga tahun 2021 jumlah Pekerja Migran Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat dari tahun 2020 terdapat 4.355 pekerja migran yang ditempatkan di luar negeri. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar

6.364 orang dan pada tahun 2022 terdapat 11.023 Pekerja migran yang ditempatkan di luar negeri. Dengan adanya fenomena ini maka bekerja di luar negeri masih menjadi tren yang cukup diminati di kalangan masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh [kompas.com](https://www.kompas.com) Pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengungkapkan, setidaknya ada 49.682 pekerja migran Indonesia (PMI) yang harus pulang ke Tanah Air dalam bulan April hingga Mei 2021. Menurut data yang dikutip dari [Kompas.com](https://www.kompas.com), kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan, PMI tersebut harus kembali karena masa kontrak kerja mereka sudah selesai. “Jadi ini pulang karena habis masa kontrak kerjanya di bulan April Mei 2021, 49.682 (orang),” kata Benny dalam diskusi virtual “Mencari Kepastian Nasib Pekerja Migran Indonesia”, Rabu (5/5/2021)

Pekerja migran merupakan salah satu kelompok pekerja yang memiliki kerentanan yang tinggi di tempat kerja mereka. Hanya dengan status mereka sebagai migran, mereka sudah secara inheren berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi. Hal ini menjadi lebih rumit ketika pekerja migran bekerja di sektor-sektor informal, di mana cakupan perlindungan hukum ketenagakerjaan sering kali tidak mencakup mereka. Dalam semangat solidaritas antar pekerja lintas negara, banyak pekerja migran yang memutuskan untuk

tidak melanjutkan pekerjaan mereka di luar negeri dan memilih untuk kembali bekerja di Indonesia.

Penelitian oleh Lely Indah Mindarti dan Putri Nabil mengenai pemberdayaan mantan pekerja migran Indonesia melalui program Desmigratif di Desa Arjowilangun, Kabupaten Malang, memberikan gambaran tentang upaya konkret dalam memfasilitasi integrasi para mantan pekerja migran ke dalam masyarakat dan pasar kerja di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan mantan pekerja migran dilakukan melalui empat fokus kegiatan, yaitu layanan migrasi, usaha produktif, community parenting, dan koperasi. Bentuk pemberdayaan tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, pemerintah desa setempat, dan para mantan pekerja migran itu sendiri.

Namun, masalah yang terjadi adalah ketika para mantan buruh migran Indonesia (BMI) kembali ke Indonesia, banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif bagi mereka dan keluarga mereka, karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, diperlukan proses pemberdayaan yang sistematis dan terkoordinasi yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari penelitian tersebut, penting untuk memahami bahwa pemberdayaan pekerja migran memiliki peran yang sangat penting. Dalam konteks ini, penelitian lanjutan tentang pemberdayaan mantan pekerja migran Indonesia setelah purna tugas di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi relevan. Melalui penelitian tersebut, akan dimungkinkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemberdayaan mantan pekerja migran setelah purna tugas memiliki implikasi yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Secara individu, pemberdayaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mantan pekerja migran, serta membantu mereka untuk menyesuaikan diri kembali ke dalam masyarakat dan pasar kerja di Indonesia. Di sisi lain, dari sudut pandang sosial dan ekonomi, pemberdayaan mantan pekerja migran dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di masyarakat, serta

meningkatkan kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal dan nasional.

Oleh karena itu, penelitian tentang pemberdayaan mantan pekerja migran setelah purna tugas di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dan pasar kerja di Indonesia. Melalui pendekatan yang holistik dan terkoordinasi antara berbagai pihak terkait dengan upaya pemberdayaan bagi mantan pekerja migran Indonesia, harapannya adalah bahwa semua pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat yang signifikan. Dengan kata lain, upaya ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif bagi para mantan pekerja migran itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas, pemerintah, dan berbagai pihak lain yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, tujuan utama dari pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi mantan pekerja migran Indonesia secara keseluruhan.

Pertama-tama, upaya pemberdayaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh para mantan pekerja migran. Mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka melalui peningkatan kemampuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya yang dapat membantu mereka memulai kembali kehidupan di tanah air. Dengan adanya dukungan dan bantuan yang memadai, mereka diharapkan dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang layak.

Selain itu, upaya pemberdayaan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Para mantan pekerja migran yang berhasil memulai dan mengembangkan usaha mereka di tanah air dapat menjadi contoh inspiratif bagi masyarakat sekitar, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga bagi komunitas dan masyarakat secara luas.

Selanjutnya, upaya pemberdayaan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah. Dengan adanya dukungan yang memadai bagi para mantan pekerja migran, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya manusia di tingkat lokal dan nasional. Hal ini akan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi

dan sosial negara secara keseluruhan, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua warga negara, termasuk mantan pekerja migran.

Terakhir, upaya pemberdayaan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi mantan pekerja migran Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya dukungan yang memadai dari pemerintah dan masyarakat, para mantan pekerja migran diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang mereka hadapi, serta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang layak. Hal ini akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian dan cita-cita mereka.

Dengan demikian, upaya pemberdayaan bagi mantan pekerja migran Indonesia bukan hanya sekedar sebuah program atau kebijakan, tetapi juga merupakan sebuah komitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan dukungan yang solid dari semua pihak, diharapkan upaya pemberdayaan ini dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi para mantan pekerja migran, masyarakat, dan negara secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana proses program pemberdayaan pelatihan yang diberikan BP2MI Yogyakarta terhadap pekerja migran di Yogyakarta setelah purna tugas ?
- Bagaimana hasil dari program pemberdayaan pelatihan yang diberikan BP2MI Yogyakarta terhadap pekerja migran indonesia .

1.3 Tujuan Penelitian

- Ingin mengetahui dan menganalisis proses program pemberdayaan pelatihan yang diberikan BP2MI Yogyakarta terhadap pekerja migran di Yogyakarta setelah purna tugas
- Ingin mengetahui hasil dari program pemberdayaan pelatihan yang diberikan BP2MI Yogyakarta terhadap pekerja migran indonesia

1.4 Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis agar menambah wawasan terhadap teori-teori, metode-metode dan konsep-konsep yang digunakan penulis sehingga dijadikan sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dengan penelitian terdahulu.

Penelitian pertama dilakukan oleh Arifiartiningsih (2016) yang membahas tentang Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) di Desa Lipursari Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Buruh Migran Perempuan (BMP) seringkali diposisikan sebagai pihak yang terpinggirkan (marginal) setelah pulang ke Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemberdayaan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial yang dilakukan dengan menggunakan intervensi melalui komunitas/organisasi (Migrant Care, SARI, MUIWO dan Istana Rumbia) serta pemerintah yang meliputi dinas memberikan dampak positif bagi mantan Buruh Migran Perempuan (BMP).

Penelitian kedua dilakukan oleh Lely Indah Mindarti dan Putri Nabil (2019) yang membahas tentang Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Desmigratif (Studi di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu keterbatasan lapangan pekerjaan dan faktor ekonomi menumbuhkan motivasi masyarakat untuk mencari peluang di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan mantan PMI dengan menggunakan program Desmigratif melalui empat fokus yaitu layanan migran, usaha produktif, Community parenting dan koperasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Yuyun Yunena (2019) yang membahas tentang Pemberdayaan Ekonomi pekerja Buruh Migran melalui Program Community Development (CED) di Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mantan pekerja migran setelah pulang ke Indonesia tidak bekerja lagi sehingga mengalami permasalahan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Community Development dilaksanakan dengan cara pelatihan usaha dan pemberian modal.

Penelitian keempat dilakukan oleh Anita Rosiyanti dan Fulia Aji Gustaman (2020) yang membahas tentang Pemberdayaan Perempuan di Desa Migran Produktif (Desmigratif) Guna Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Perempuan Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu seseorang yang pernah bekerja di Luar Negeri akan mengalami ketergantungan untuk bekerja di Luar Negeri. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa program Desmigratif dilaksanakan melalui berbagai macam kelompok-kelompok seperti srikandi batik, srikandi jahit, srikandi masak dan srikandi rajut.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Vida Afifah Faza (2018) yang membahas Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna (TKI PURNA) di Kabupaten Blitar (Studi pada Komunitas Keluarga Buruh Migran Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna dan Keluarga/KKBM Pertika Kabupaten Blitar). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

Fenomena kemiskinan, pengangguran, dan sulitnya akses pendidikan yang masih dihadapi oleh sebagian masyarakat Indonesia menjadi bukti akan rendahnya tingkat kehidupan sosial di negara ini. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga untuk mengatasi masalah ini, namun tantangan tersebut masih menjadi permasalahan yang serius yang perlu penanganan lebih lanjut.

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang persisten di Indonesia. Meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, namun masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah rumah tangga miskin di berbagai daerah, serta rendahnya kualitas hidup yang dialami oleh sebagian besar penduduk. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Selain kemiskinan, pengangguran juga menjadi masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Tingginya tingkat pengangguran, terutama di kalangan pemuda dan lulusan baru, menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tenaga kerja di pasar kerja. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya keterampilan dan pendidikan

yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta rendahnya akses terhadap peluang kerja yang layak bagi sebagian masyarakat.

Selain kemiskinan dan pengangguran, akses terhadap pendidikan yang berkualitas juga masih menjadi tantangan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan di negara ini, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang mampu dan tidak mampu secara ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam hal kemampuan dan peluang antara individu-individu yang berbeda.

Dalam konteks penelitian ini, KKBM Pertakina Kabupaten Blitar menjadi salah satu contoh lembaga yang berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan akses pendidikan di tingkat lokal. KKBM Pertakina memiliki dua peran utama, yaitu sebagai koperasi dan sebagai lembaga swadaya masyarakat. Sebagai koperasi, KKBM Pertakina memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi melalui berbagai program dan layanan yang mereka sediakan. Sebagai lembaga swadaya masyarakat, KKBM Pertakina juga aktif dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam hal pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Melalui peran ganda ini, KKBM Pertakina berusaha untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Blitar. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, KKBM Pertakina membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di daerah tersebut. Selain itu, dengan memberikan dukungan dan bantuan dalam hal pendidikan, KKBM Pertakina juga membantu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan dalam kehidupan mereka.

Namun demikian, meskipun telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan akses pendidikan, tantangan yang dihadapi oleh KKBM Pertakina dan lembaga sejenis lainnya masih sangat besar. Diperlukan kerja keras dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri, untuk dapat mengatasi masalah ini dengan efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan tingkat kehidupan sosial masyarakat di Indonesia tidak bisa hanya ditangani oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak yang terlibat. Hanya dengan adanya dukungan yang kuat dan komitmen yang tinggi dari semua pihak, maka kita dapat mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berikut ini merupakan rangkuman dari beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian tentang Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Setelah Purna Tugas dijelaskan pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penelitian-Penelitian Terdahulu

Judul	Masalah Penelitian	Teori	Metode	Hasil Penelitian
Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) di Desa Lipursari Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo (Arifiartiningsih, 2016)	Buruh Migran Perempuan (BMP) seringkali diposisikan sebagai pihak yang terpinggirkan (marginal) setelah pulang ke Indonesia.	Pemberdayaan	Kualitatif	Pemberdayaan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial memberikan dampak positif.
Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Desmigratif Studi	Keterbatasan lapangan pekerjaan dan faktor ekonomi menumbuhkan motivasi	Pemberdayaan	Kualitatif	Proses pemberdayaan mantan PMI dengan menggunakan

di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang (Lely Indah Mindarti dan Putri Nabil 2019).	masyarakat untuk mencari peluang di luar negeri.			program Desmigratif melalui empat fokus yaitu layanan migran, usaha produktif, Community parenting dan Koperasi
Pemberdayaan Ekonomi pekerja Buruh Migran melalui Program Community Development (CED) di Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten	Mantan pekerja migran setelah pulang ke Indonesia tidak bekerja lagi sehingga mengalami permasalahan ekonomi.	Pemberdayaan	Kualitatif	program Community Development dilaksanakan dengan cara pelatihan usaha dan pemberian modal.
Indramayu (Yuyun Yunena, 2019)				
Pemberdayaan Perempuan di Desa Migran Produktif (Desmigratif) Guna Meningkatkan Kemandirian	Seseorang yang pernah bekerja di Luar Negeri akan mengalami ketergantungan	Pemberdayaan	Kualitatif	Program Desmigratif dilaksanakan melalui berbagai macam kelompok-kelompok seperti

Ekonomi Perempuan Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal (Anita Rosiyanti dan Fulia Aji Gustaman, 2020)	untuk bekerja di Luar Negeri			srikandi batik, srikandi jahit, srikandi masak dan srikandi rajut.
Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna (TKI PURNA) di Kabupaten Blitar (Studi pada Komunitas Keluarga Buruh Migran Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna dan Keluarga/KKBM Pertika Kabupaten Blitar (Vida Afifah Faza, 2018).	Kemiskinan, pengangguran dan pendidikan yang masih sulit diperoleh masyarakat menjadi bukti masih rendahnya kehidupan sosial masyarakat di Indonesia.	Pemberdayaan	Kualitatif	KKBM Pertakina Kabupaten Blitar memiliki dua peran yaitu sebagai koperasi dan sebagai lembaga Swadaya masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penggambaran proses pemberdayaan serta hasil dari proses pemberdayaan tersebut, sementara itu persamaan penelitian ini terletak pada kesamaan konsep yang digunakan yaitu pemberdayaan serta metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif

1.5 Kerangka Konsep

1.5.1. Pemberdayaan

Penguatan kawasan seringkali sulit dipisahkan dari pembenahan kawasan karena berkaitan dengan implikasi pemanfaatannya di mata masyarakat. Penguatan kawasan lokal merupakan gagasan perbaikan finansial yang merangkum nilai-nilai kawasan lokal untuk membangun pandangan dunia lain yang sedang dikembangkan berpusat pada rakyat, partisipatif, pemberdayaan dan berkelanjutan (people-centered, participatory, empowerment and sustainable) (Chamber, 1995).

Menurut Saifuddin, dkk (dalam Priyono dan Pranarka, 2017: 8) dalam buku manajemen Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu mengemukakan bahwa pemberdayaan ialah tata cara atau proses yang digunakan untuk menguatkan individu-individu atau masyarakat supaya berdaya dalam menentukan pilihan hidupnya dengan cara mendorong atau memberikan memotivasi terhadap mereka agar dapat tercapainya perubahan sosial yang dapat membuat masyarakat atau individu-individu menjadi cukup kuat dalam beradaptasi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu maka dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dibutuhkan pengenalan terhadap hakekat manusia yang akan memberikan sumbangan untuk menambah wawasan terhadap masyarakat (Hamid, 2018: 11).

Selanjutnya menurut Handi (2019: 46) dalam buku pemberdayaan masyarakat desa mengemukakan bahwa terdapat beberapa prinsip-prinsip pemberdayaan antara lain, yaitu : a). Minta dan kebutuhan, b). Organisasi masyarakat bawah c). keragaman budaya d). Perubahan budaya. e). Kerjasama dan partisipasi, f). Demokrasi dalam penerapan ilmu, g). Belajar sambil bekerja, h). Penggunaan metoda yang sesuai. i) Kepemimpinan, j) Spesialis yang terlatih, k). Segenap keluarga dan l). Kepuasan.

Menurut Sumaryadi (2005: 111), pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan sosial berkelanjutan

Dalam mendukung terlaksananya masyarakat yang berdaya dibutuhkan proses tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat diungkapkan oleh Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (Wrihatnolo : 2007) sebagai berikut :Terdapat 3 tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat diungkapkan oleh Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2007:101) sebagai berikut, anatarlain:

1. Tahap Penyadaran: dalam tahap ini dimulai dari memberikan pemahaman terkait hak untuk menjadi mampu dan memotivasi mereka agar keluar dari kemiskinan, biasanya tahap ini dilakukan dengan pendampingan.

2. Tahap pengkapasitasan: memampukan masyarakat kurang mampu agar memiliki keterampilan untuk mengambil peluang yang diberikan dengan melakukan pelatihan – pelatihan, dan kegiatan yang memiliki tujuan meningkatkan life skill.

3. Tahap Pendayaan: tahap dimana masyarakat diberi peluang sesuai kemampuan melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan dengan memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat sesuai kapasitas dan kapabilitas serta akomodasi aspirasi dan dipandu untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil pelaksanaan pilihan sebelumnya.

1.5.2. Pekerja Migran Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan definisi yang tegas mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut undang-undang tersebut, PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Meskipun undang-undang ini memberikan perlindungan bagi PMI selama mereka berada di luar negeri, namun masalah sering muncul ketika mereka kembali ke tanah air dan menjadi Mantan Buruh Migran Indonesia (MBMI).

Salah satu masalah yang dihadapi oleh para MBMI adalah tingginya tingkat pengangguran dan ketidakproduktifan setelah mereka kembali ke Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks, termasuk kurangnya keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja lokal, ketidaksesuaian sertifikasi atau pengalaman kerja dengan standar nasional, serta kurangnya akses mereka terhadap pelatihan lanjutan dan kesempatan kerja yang layak.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu diimplementasikan serangkaian kebijakan dan program yang bertujuan untuk mendukung reintegrasi sosial dan ekonomi para MBMI ke dalam masyarakat dan pasar kerja di Indonesia. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain:

Pelatihan Keterampilan: Pemerintah perlu menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di Indonesia, seperti keterampilan dalam bidang pertanian, industri kreatif, teknologi informasi, dan lain-lain. Pelatihan ini harus disesuaikan dengan potensi dan minat para MBMI serta memperhitungkan perkembangan terbaru dalam dunia kerja.

Reorientasi Karir: Program-program orientasi karir dapat membantu para MBMI untuk mengevaluasi kembali kemampuan dan minat mereka, serta membimbing mereka untuk memilih jalur karir yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.

Pendampingan dan Bimbingan: Para MBMI membutuhkan pendampingan dan bimbingan yang intensif dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke pasar kerja Indonesia. Pendampingan ini dapat meliputi pembuatan rencana karir, pembuatan CV, serta pelatihan keterampilan soft skills seperti keterampilan komunikasi dan kepemimpinan.

Pembinaan Usaha Mandiri: Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan modal usaha bagi para MBMI yang berminat untuk menjadi pengusaha mandiri. Program ini dapat membantu mereka dalam memulai dan mengelola usaha mereka sendiri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri dan masyarakat sekitar.

Pengakuan dan Validasi Kompetensi: Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme yang memungkinkan para MBMI untuk mengakui dan memvalidasi kompetensi yang mereka peroleh

selama bekerja di luar negeri. Hal ini akan membantu mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan keterampilan mereka.

Advokasi dan Perlindungan Hak: Penting bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan advokasi dan perlindungan hak para MBMI, termasuk hak-hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi.

Pengembangan Kebijakan: Pemerintah perlu terus mengembangkan kebijakan yang mendukung reintegrasi sosial dan ekonomi para MBMI, serta memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berbasis bukti.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan para MBMI dapat lebih mudah untuk menyesuaikan diri kembali ke dalam masyarakat dan pasar kerja di Indonesia, serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mereka secara keseluruhan.

1.6 Kerangka Berpikir

